



Penyusunan APBDes Banyak Catatan

◆ Sebagian Besar Desa Dikoreksi

EDITOR: BALLADEWA SETLIGHT
PELIPUT: HESLY MARENTEK

MITRA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagian besar desa di Kabupaten Mitra masih memiliki catatan.

Ini terungkap menyusul evaluasi penyusunan APBDes 2020 yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). "Hasil evaluasi kami, hampir semua APBDes dari seluruh desa

masih ada sejumlah catatan yang wajib untuk dikoreksi," ungkap Kepala Dinas PMD Royke Lumingas. Menurut Royke yang menjadi catatan sebagaimana dimaksud salah satu contohnya seperti Ren-

cana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian adanya sejumlah program kegiatan yang tidak sesuai pada APBDes. "Ini yang kami wajibkan mereka untuk segera melakukan koreksi secepatnya dengan berkonsultasi dengan instansi teknis," ujarnya seraya menyebut ada batas waktu yang sudah diberikan. "Kalau lewat tentu akan diberikan sanksi bagi desa tersebut," sebutnya.

Dia pun menambahkan, evaluasi APBDes ini mengacu pada Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk melihat kesesuaian antara perencanaan desa

dan rancangan APBDes. Selain itu, tim evaluasi juga melihat penyaluran program di desa dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih pada kegiatan. "Untuk yang dikoreksi sudah kami ingatkan. Jika lewat batas pemasukan, tentu akan disanksi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Meyri Mokorimban menjelaskan, untuk koreksi seperti RAB harus berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). "Kami minta segera dikoreksi. Seperti berkonsultasi dengan Dinas PU. Setelah dilakukan koreksi wajib untuk direview

kembali oleh tim," katanya. Dia pun mengungkapkan, desa diberikan kesempatan maksimal tujuh hari untuk melakukan koreksi dan disodorkan kembali ke tim evaluasi. "Setelah disesuaikan nantinya baru bupati akan menerbitkan keputusan bupati tentang hasil evaluasi. Setelah itu APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa," tandasnya.

Diketahui tim evaluasi APBDes terdiri DPMD, Inspektorat, DPUPR, Dinas Perkim, BPKPD, Bapeda, Bagian Hukum, Bagian Tapem, dan Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Mitra. (***)